

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prasangka rasial adalah masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Meskipun masalah ini sudah lama ada. Identitas setiap orang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu mereka lebih memahami siapa diri mereka, menurut teori identitas Simon Fisher. Identitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut termasuk agama, geografi, bahasa, struktur sosial, budaya, dan ras.

Merasa termasuk dalam suatu kelompok adalah kebutuhan fundamental bagi manusia sebagai makhluk sosial, sehingga manusia cenderung mengidentifikasi diri berdasarkan identitasnya. Identitas sangat dapat memperkuat persatuan di antara manusia, namun di sisi lain, dapat menyebabkan konflik budaya, dan jika dibiarkan terus-menerus, dapat berujung pada kekerasan terbuka.

Gerakan *Black Lives Matter*, juga dikenal sebagai BLM, mulai memperkuat hak asasi manusia dan membantu orang yang menderita. Perjanjian internasional ini dan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) berhubungan satu sama lain. Namun, ada kekhawatiran tentang bagaimana hukum internasional menafsirkan rasisme yang mendorong *Black Lives Matter* dan tanggung jawab AS atas pelanggaran rasial yang dilakukan oleh orang Amerika sendiri. Makalah ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis masalah ini. Karena gerakan BLM di Amerika Serikat tidak mematuhi Konvensi Internasional tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial (ICERD), itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara internasional.

Meskipun "racial profiling" tidak dijelaskan secara khusus dalam ICERD, Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Racial secara implisit menjelaskan dalam rekomendasi umumnya No. 31 (2005). Amerika Serikat telah menetapkan bahwa undang-undang harus disahkan sebelum diberlakukan agar peraturan ICERD dapat diterapkan di pengadilan negara tersebut. Namun, hak asasi manusia internasional menegaskan bahwa "profil rasial" Amerika Serikat tidak dapat dibenarkan.

Presiden Joe Biden menyatakan bahwa pemerintahannya didedikasikan untuk "mengembalikan jiwa Amerika", menunjukkan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas diskriminasi rasial yang terjadi di bawah hukum internasional. Deklarasi ini menunjukkan keinginan untuk memerangi kekerasan rasial dan diskriminasi rasial di negara ini. Ini adalah masalah hukum hak asasi manusia internasional karena kampanye *Black Lives Matter* (BLM) melibatkan diskriminasi rasial, yang bertentangan dengan ICERD.

Amerika Serikat harus memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional terkait masalah rasisme di negaranya sendiri. Pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ini

adalah tindakan yang tepat untuk menegakkan kewajibannya di bawah hukum internasional.¹

Identitas kelompok dapat menjadi bahaya jika kelompok lain dalam masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda merasa terancam oleh identitas tersebut. Identitas ini seringkali diancam dengan cara yang paling langsung, terutama dengan kebencian. Johan Galtung mengatakan bahwa kebencian terhadap identitas yang berbeda adalah sejenis kekerasan budaya. Kekerasan budaya tidak selalu ditunjukkan secara fisik, tetapi efeknya dapat sangat besar.

Menurut Galtung, kekerasan kultural dapat berkembang menjadi kekerasan terbuka jika dibiarkan berlanjut. Salah satu contoh kekerasan terbuka adalah konflik suku yang disebabkan oleh perbedaan identitas. Namun, prasangka rasial adalah contoh nyata dari kekerasan budaya. Dalam situasi-situasi seperti ini, penting untuk memahami dan mengatasi sumber-sumber ketegangan dan kebencian antar kelompok masyarakat. Perlu adanya dialog, pengertian, dan pendidikan untuk mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan identitas. Dengan cara ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua anggotanya, tanpa mengabaikan keanekaragaman yang ada.²

¹ Anne Power and William Julius Wilson, "Social Exclusion and the Future of Cities", diakses 4 Maret 2021, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.9959&rep=rep1&type=pdf>.

² Australia akan mengakui Aborigin dalam Konstitusi pada 2017 tersedia di [Australia akan Mengakui Aborigin dalam Konstitusi pada 2017 \(cnnindonesia.com\)](http://www.cnnindonesia.com)

Kegigihan rasisme di Amerika Serikat telah mendorong banyak gerakan sosial global. Sebaliknya, gerakan sosial global merujuk pada upaya organisasi atau kelompok tidak resmi untuk mengubah keadaan saat ini melalui kampanye masalah sosial dan politik. *Black Lives Matter* (BLM) adalah gerakan sosiopolitik yang didirikan di Rosmanto pada Juni 2013 untuk mengutuk kekerasan terhadap orang kulit hitam, termasuk kebrutalan polisi. Ini adalah salah satu kelompok sosial pertama di dunia yang berfokus pada masalah rasisme.³

Gerakan sosial *Black Lives Matter* didirikan pada 2013 sebagai tanggapan atas julukan rasial yang terus-menerus muncul di Amerika Serikat. Ini didirikan sebagai tanggapan atas sejumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi AS terhadap komunitas Afrika-Amerika. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghentikan kekerasan dan dominasi kulit putih terhadap komunitas Afrika-Amerika.

Gerakan *Black Lives Matter* telah menjadi fenomena yang menarik perhatian orang di seluruh dunia, bukan hanya orang Amerika. Gerakan ini bertujuan untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan hak asasi manusia. Ini terkait dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua kebebasan dan hak yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna

³ STRATEGI BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK FOUNDATION (BLMGNF) DALAM PROSES TRANSNASIONALISASI GERAKAN BLACK LIVES MATTER 2022 MUH. NUR ICHSAN TAUHID [4518023020.pdf](https://unibos.ac.id/4518023020.pdf) (unibos.ac.id)

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal kebangsaan, harta benda, kelahiran, status sosial, atau pekerjaan.

Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR) adalah dasar hukum internasional yang digunakan oleh semua negara anggota PBB untuk mengatur hak asasi manusia di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1965. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai landasan penting dalam perjuangan global untuk hak asasi manusia dan melawan diskriminasi rasial, dengan Pasal 2 Konvensi ICERD mengutuk segala bentuk diskriminasi rasial dan meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengakhiri diskriminasi rasial dalam bentuk apa pun.⁴

Tujuh tahun setelah dimulainya gerakan *Black Lives Matter*, masalah diskriminasi rasial masih merupakan perhatian yang mendesak di Amerika Serikat. Terus terjadinya contoh kekerasan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap orang Afrika-Amerika menyoroti isu ini. Salah satu insiden penting yang menyoroti masalah ini adalah kematian George Floyd pada 25 Mei 2020. Ia adalah seorang pria Afrika-Amerika yang meninggal saat berada dalam tahanan petugas polisi di Minnesota, Amerika Serikat. Selama penangkapannya karena dicurigai menggunakan uang palsu, Floyd mengalami kesulitan bernapas karena petugas polisi menekan lehernya.

⁴ Pasal 2 ICERD 1965

Gerakan *Black Lives Matter* tidak hanya berdampak di Amerika Serikat, tetapi juga menyebar ke beberapa kota besar di Australia, seperti Sydney, Brisbane, Adelaide, dan Melbourne, dengan terjadinya gelombang protes *Black Lives Matter*. Protes ini bukan hanya menunjukkan solidaritas dan empati terhadap George Floyd dan komunitas Afrika-Amerika, tetapi juga menjadi wadah ekspresi tuntutan rakyat Australia terhadap keadilan dalam perlakuan terhadap penduduk Aborigin. Pemerintah Australia telah dikritik karena adanya diskriminasi rasial historis dan berkelanjutan terhadap masyarakat adat, termasuk insiden kekerasan yang menyebabkan kematian saat berada dalam tahanan petugas polisi Australia.

Protes di Australia mencerminkan bahwa perjuangan melawan diskriminasi rasial adalah isu global, dengan orang-orang dari berbagai negara menyuarakan dukungan dan mencari perubahan di negara mereka sendiri. Baik gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat maupun protes di Australia berperan sebagai pengingat tentang pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengatasi dan menghapuskan ketidakadilan rasial di seluruh dunia.

Kematian George Floyd telah memicu demonstrasi di Minnesota dan Minneapolis, dengan ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas kematiannya. Hal ini terjadi meskipun Amerika Serikat masih berjuang dengan pandemi COVID-19. Dalam menghadapi permasalahan rasisme yang terus berulang dan semakin meresahkan, sangat penting bagi pihak lain yang memiliki pengaruh global untuk ikut serta dalam mencari solusi dan menekan negara-negara anggota agar bersama-sama mengatasi masalah ini.

OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia), sebagai bagian dari sekretariat PBB, memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendorong Hak Asasi Manusia, terutama dalam upaya melawan rasisme. Dalam kapasitasnya ini, lembaga tersebut memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat untuk menghadapi masalah rasisme di negara tersebut.

Situasi serupa terjadi di Sydney pada tahun 2015, ketika terjadi kematian David Dungay, seorang pria Aborigin, selama penahanan. Kematian Dungay disebabkan oleh tindakan kekerasan oleh beberapa anggota polisi, dan kata-kata terakhirnya mencerminkan permohonan George Floyd, yaitu "Saya tidak bisa bernapas." Keluarga Dungay yang diwakili oleh pengacaranya menegaskan bahwa David Dungay meninggal karena penyiksaan oleh empat anggota kepolisian. Kasus ini telah diajukan ke sistem hukum, namun hingga saat ini belum ada kejelasan atau penyelesaian atas masalah tersebut.⁵

Australia, yang memiliki populasi sekitar 25 juta orang, memiliki sekitar 2,4% penduduk asli Australia, yang terdiri khususnya dari etnis Aborigin. Namun, mencermati jumlah narapidana di Australia, separuhnya adalah individu Aborigin. Organisasi "*Change the Record*," sebuah koalisi yang berkomitmen untuk mencapai keadilan bagi masyarakat Aborigin, melaporkan bahwa antara tahun 1980 dan 2011, tercatat 449 kematian Aborigin di dalam tahanan, menyumbang sekitar 24% dari keseluruhan kematian narapidana selama periode tersebut.

⁵ *Australia janjikan referendum pengakuan aborigin dalam konstitusi tersedia di [Australia Janjikan Referendum Pengakuan Aborigin dalam Konstitusi - Medcom.id](#)*

Protes *Black Lives Matter*, yang menyentak di seluruh Australia, telah mengejutkan berbagai lapisan masyarakat termasuk elit politik. Demonstrasi ini tidak hanya menunjukkan solidaritas, tetapi juga menggambarkan kasus-kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Australia dari waktu ke waktu. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengakui permintaan awal untuk keadilan dalam gerakan *Black Lives Matter*, tetapi kemudian menyatakan keprihatinannya tentang berkembangnya agenda politik dalam gerakan tersebut.⁶

Bangkitnya gerakan *Black Lives Matter* tahun lalu setelah pembunuhan dari George Floyd di Minneapolis dan dari Jacob Blake di Kenosha di tangan pejabat publik adalah reaksi populer yang sangat mirip satu set kekejaman kekerasan yang dihasilkan dari struktural ekstrem ketidakadilan. Itu menyebabkan kemarahan publik yang dibenarkan, mengungkapkan rasa benci pada polisi kebrutalan, dan penghapusan simbol rasis dari tempat umum.

Ini protes dengan tuntutan serupa untuk mengakhiri rasisme sistemik muncul dunia dan mereka setidaknya mengungkapkan bahwa ketidakadilan struktural ada di semua demokrasi hanya bervariasi dalam derajat dan bentuk. Terlepas dari respons emosional yang luar biasa dari orang-orang yang mendukung Gerakan *Black Lives Matter*, bukan frase politik kosong di dalamnya surat kabar maupun argumen akademik didukung oleh mengesankan data empiris di banyak jurnal tampaknya mampu bergulat dengan itu kedalaman dan kebesaran masalah. Dan mengingat sejarah yang tidak efektif begitu banyak undang-undang anti-

⁶ *Close The Gap Report 2020 The Australian Human Right Commission. Calls To End Indigenous Death In Custody. (2020)*

diskriminasi, tampaknya solusinya mungkin juga tidak hanya terletak pada memperkenalkan undang-undang baru. Jadi, menurut saya, pertama, ada kebutuhan untuk masuk lebih dalam dan mempertanyakan filosofi dasar prinsip hukum tata negara itu sendiri.⁷

Karena sejak Delapan Belas gerakan Pencerahan abad, keyakinan filosofis dan moral dalam pemikiran politik barat telah mendedikasikan diri dalam menegakkan Kebebasan Individu sebagai kebajikan moral dan politik tertinggi sebelum semuanya nilai-nilai politik lainnya dapat dikorbankan, bahkan Kesetaraan. Gagasan 'Kontradiksi Nilai' yang dibahas di atas dan prioritas Kebebasan Individu merembes dalam filsafat konstitusional. Itu tidak hanya berbentuk struktur, tujuan dan ruang lingkup undang-undang anti-diskriminasi di seluruh berbagai negara demokrasi, hal itu juga mempengaruhi teori-teori ketatanegaraan interpretasi dan sikap yudisial. Sikap kaku legislator dan hakim mengecilkan konsep seperti Tindakan Afirmatif dan Kesetaraan Substantif. Ini membuat perubahan struktural dalam politik kita dan masyarakat lebih menantang.

Meskipun demokrasi tidak menanggapi gerakan politik sebelumnya untuk keadilan ras, gender dan kasta, namun negara tidak pernah mampu menghasilkan perubahan mendasar. Klausul atau doktrin kesetaraan memang ada dalam konstitusi kita tetapi hanya itu mencakup satu aspek persamaan yaitu persamaan perlakuan dan tidak bisa menjamin kesetaraan, terutama bagi komunitas yang dikucilkan

⁷ Isaiah Berlin, 'Two Concepts of Liberty' in Henry Hardy (ed), *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty* (Oxford University Press, 2002) 166-217; And also see *Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, [London: John Murray, 1991, Henry Hardy (ed.)]

secara historis, secara substansial. Misalnya, rezim konstitusional yang demokratis saat ini hanya menjamin asas persamaan perlakuan atau persamaan formal, yang disadari mengabaikan faktor sosio-historis (pemeran, ras, jenis kelamin, dll.) di mana a seseorang mengembangkan individualitasnya. Bahkan jika faktor sosio-historis ini bertindak sebagai penghalang bagi warga negara dalam kehidupan mereka, kesetaraan formal menentukan kebutaan yang ketat terhadap faktor-faktor ini.⁸

Sejak awal Juni 2020, rakyat Australia telah menyaksikan unjuk rasa *Black Lives Matter* di negara kita sendiri, di mana penduduk asli dan non-pribumi berkumpul, untuk memperkuat tuntutan orang pertama Australia agar Australia menghibur polisi yang sedang berlangsung dan kekerasan kustodian terhadap mereka. Demikian pula, kata-kata 'Saya Tidak Bisa Bernapas' bergema di seluruh Australia. Suara Mr.David dungay Jnr seorang pria Dunghutti berusia 26 tahun meneriakkan kata-kata ini ketika ditahan oleh enam sipir penjara dalam 'prosedur de-eskalasi' di unit mental rumah sakit penjara, di New South Wales pada tahun 2015.⁹

Ketika Kapten James Cook, anggota angkatan laut Inggris, mengunjungi pantai timur dan berlabuh di Botany Bay pada tahun 1770, Australia memperhatikan masalah rasial. Cook menyarankan kepada otoritas Inggris untuk menggunakan wilayah Australia sebagai Terra Nullius dan menyelesaikan masalah kelebihan

⁸ *CONCEPTUALISING 'BLACK LIVES MATTER': TIME TO CONSIDER SUBSTANTIVE EQUALITY AS A FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL GUARANTEE* [Conceptualising 'Black Lives Matter': Time to consider Substantive Equality as a Fundamental Constitutional Guarantee by Sawinder Singh :: SSRN](#)

⁹ *ibid.*

penduduk penjara di Inggris. Pada tahun 1787, pelayaran pertama menuju Australia dari Inggris membawa 736 tahanan dan 300 sipir; tujuan utamanya adalah membangun koloni di Australia untuk menampung narapidana.

Selain berfungsi sebagai koloni untuk narapidana, Inggris memiliki tujuan lain dalam mengembangkan Australia, termasuk menjadikannya sebagai pemasok angkatan laut dan pangkalan maritim. Hal ini merupakan bagian dari strategi Inggris untuk meningkatkan perdagangan dan pengiriman dengan China, yang juga dikenal sebagai kebijakan "berayun ke timur". Seiring berlalunya waktu, pemerintah Inggris mulai membentuk sistem pemerintahan di Australia.

Pada tahun 1850, pemerintah Inggris menerapkan Australian Colonies Act yang menetapkan sistem pemerintahan dengan tanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Australia, termasuk suku Aborigin. Saat itu, banyak anak Aborigin hidup dalam kondisi kemiskinan dan kesulitan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas yang layak. Sebagai respon terhadap situasi ini, pemerintah Australia mengambil langkah-langkah untuk merawat dan mengawasi anak-anak Aborigin tersebut. Upaya tersebut bertujuan tidak hanya memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan, tetapi juga mendorong integrasi mereka dengan anak-anak kulit putih. Pendekatan ini didukung oleh beberapa tokoh masyarakat pada saat itu.

Namun, meskipun niat baik dari pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan, dampaknya pada komunitas Aborigin ternyata rumit dan kontroversial. Konteks sejarah ini menyoroiti bagaimana proses kolonisasi awal dan pembangunan

negara Australia telah sangat mempengaruhi masyarakat adat, menyebabkan masalah diskriminasi rasial yang masih berlanjut hingga saat ini.¹⁰

Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut berlawanan dengan niat awal pemerintah. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan anak-anak yang terlantar, tetapi secara paksa mencabut anak-anak suku Aborigin yang hidup bahagia dengan orang tua mereka. Setelah diambil oleh pemerintah Australia, anak-anak tersebut tidak dapat bertemu lagi dengan orang tua mereka. Mereka dipindahkan dan juga dikumpulkan dalam kamp-kamp, di mana mereka diberikan pendidikan untuk mengadopsi gaya hidup orang kulit putih.

Ketika anak-anak suku Aborigin mencapai usia dewasa, mereka dipaksa bekerja sebagai budak bagi keluarga kulit putih di Australia. Banyak pihak menuduh bahwa "*Stolen Generation*" bukan hanya diskriminasi rasial, tetapi juga perbudakan dan genosida budaya, yaitu upaya untuk menghilangkan budaya mereka. Pemerintah Australia juga mengeluarkan serangkaian aturan hukum yang mengatur "*Stolen Generation*". Setiap negara bagian di Australia memiliki undang-undang yang melegalkan pemisahan anak-anak suku Aborigin dari keluarga mereka untuk menjalani program pemerintah. Gerakan rekonsiliasi dimulai pada akhir tahun 1950-an, dengan masyarakat suku Aborigin dan aktivis hak asasi manusia berjuang untuk mencabut aturan-aturan yang merampas kebebasan sipil masyarakat suku Aborigin.

¹⁰ Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: prentice-hall

Pada tahun 1967, sebuah referendum diadakan untuk mengadopsi kebijakan kesetaraan bagi semua orang Australia, termasuk orang Aborigin. Pemerintah federal mendirikan Dewan Rekonsiliasi Aborigin pada tahun 1991 untuk mendukung adat istiadat dan budaya Aborigin. Pada tahun 2000, itu diubah menjadi Rekonsiliasi Australia. Perdana Menteri Australia saat itu Kevin Rudd menandai puncak perjuangan orang Aborigin ketika dia meminta maaf kepada orang Aborigin, khususnya generasi "Generasi yang Dicuri", atas kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Rudd mengakui bahwa asumsi rasial yang meminggirkan dan merugikan orang Aborigin mendasari undang-undang sebelumnya.¹¹

Dalam pidatonya Rudd menyatakan harapannya agar masyarakat Aborigin dianggap setara dengan masyarakat kulit putih sebagai warga Australia. Ia juga menetapkan tanggal 26 Mei sebagai *National Sorry Day* yang merupakan hari untuk menghormati masyarakat Aborigin yang mengalami marginalisasi karena kebijakan masa lalu pemerintah Australia. Hari tersebut juga dirayakan sebagai perayaan budaya dan adat istiadat masyarakat Aborigin.

Pidato permintaan maaf Kevin Rudd dianggap sebagai hasil positif bagi masyarakat Aborigin yang telah lama berjuang untuk mendapatkan hak asasi manusia dari pemerintah Australia. Meskipun banyak yang terharu mendengar permintaan maaf tersebut, masyarakat Aborigin tidak puas hanya dengan

¹¹ *Black Lives Matter tersedia di Home - Black Lives Matter*

permintaan maaf itu saja. Bagi aktivis dan pejuang hak asasi manusia di kalangan masyarakat Aborigin, permintaan maaf tersebut hanyalah langkah awal.

Pemerintah Australia juga diminta untuk melakukan upaya emansipasi bagi masyarakat Aborigin melalui program *Close The Gap* yang diawasi oleh Komisi Hak Asasi Manusia Australia. Program ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara masyarakat Aborigin dan masyarakat kulit putih Australia dalam hal angka harapan hidup, akses pendidikan dasar, lapangan pekerjaan, dan akses kesehatan.

Setelah pidato permintaan maaf Kevin Rudd pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan pembayaran kompensasi bagi masyarakat Aborigin, terutama bagi *Stolen Generation*. Meskipun banyak yang menyambut baik niat baik pemerintah, beberapa juga mengkritik pembayaran kompensasi tersebut karena dianggap hanya sebagai solusi jangka pendek.

Upaya untuk memberikan pengakuan konstitusional dan hak-hak masyarakat Aborigin telah menjadi janji dari beberapa Perdana Menteri, termasuk Julia Gillard, Tony Abbott, dan Scott Morrison. Namun, hingga saat ini, pengakuan tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Pada tahun 2010, dilakukan referendum konstitusi untuk memberikan pengakuan sebagai masyarakat asli atau pribumi Australia serta memberikan hak-hak konstitusional kepada masyarakat Aborigin, namun belum berhasil diatur dalam konstitusi. Janji serupa diberikan oleh Perdana Menteri Tony Abbott pada tahun 2015 dan gagal terlaksana hingga batas waktu yang dijanjikan.

Pada tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengakui kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dan upaya emansipasi masyarakat Aborigin

selama 11 tahun setelah permintaan maaf Kevin Rudd. Namun, ia berjanji untuk melanjutkan upaya pengakuan hak-hak masyarakat Aborigin, termasuk hak konstitusional, dalam konstitusi Australia.¹²

Morrison berambisi untuk mengadakan referendum pada tahun 2022 mengenai perubahan konstitusi terkait masyarakat adat. Banyak yang berpendapat bahwa pengakuan hak-hak penduduk asli sebagai masyarakat adat, beserta pemberian hak-hak konstitusional kepada mereka, akan berperan penting dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi rasial terhadap mereka dan membangun identitas nasional Australia yang lebih inklusif.

Perdana Menteri Scott Morrison mengakui kegagalan pemerintah Australia dalam memenuhi hak-hak dan upaya pembebasan masyarakat Aborigin, dan pernyataan ini tampaknya tepat. Berdasarkan laporan *Close The Gap* yang dirilis pada Maret 2020, pemerintah belum berhasil meningkatkan harapan hidup masyarakat Aborigin, yang kemungkinan disebabkan oleh tingginya angka bunuh diri akibat kemiskinan.

Selain itu, pemerintah Australia juga dianggap gagal memberikan kesetaraan di sektor kesehatan bagi masyarakat Aborigin. Laporan *Close The Gap* tahun 2020 secara khusus menyoroti kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan harapan hidup dan kesetaraan kesehatan bagi komunitas Aborigin. Laporan *Close The Gap*

¹²*Australian Human Rights Commission. (2014). Retrieved from http://www.racismnoway.com.au/aboutracism/cyberracism/cyber_racism_factsheet2014.pdf*

tahun 2020 mengungkapkan kesenjangan yang signifikan dalam harapan hidup antara masyarakat Aborigin dan orang kulit putih di Australia, di mana laki-laki kulit putih memiliki harapan hidup rata-rata 8 tahun lebih lama daripada laki-laki Aborigin, sementara perempuan kulit putih memiliki harapan hidup 7 tahun lebih lama daripada perempuan Aborigin.

Di samping faktor-faktor di atas, orang Aborigin juga menghadapi risiko lebih tinggi dalam penularan penyakit dibandingkan dengan rekan-rekan kulit putih di Australia, yakni dua hingga tiga kali lebih tinggi. Data dari Laporan *Close The Gap* tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 19% orang Aborigin mengalami penyakit mental, 12% mengalami penyakit kardiovaskular, 9% mengalami kanker, dan 8% mengalami penyakit pernapasan.

Laporan tersebut juga menekankan kegagalan pemerintah Australia, khususnya dalam hal kesehatan dan harapan hidup, yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak memperhatikan kearifan lokal dan kegagalan melibatkan masyarakat Aborigin. Seperti halnya penduduk asli di negara-negara lain, orang Aborigin memiliki warisan budaya dan kepercayaan yang kaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.¹³

Warisan budaya dan kepercayaan nenek moyang suku Aborigin mendorong banyak anggota komunitas mereka untuk terus menerapkan pengobatan tradisional hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Australia untuk

¹³ *Convention on Cybercrime CETS No: 185. (n.d.). Retrieved from Council of Europe Treaty Office: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun?ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG>*

mempertimbangkan kearifan lokal saat mereka membuat kebijakan yang relevan. Sebagai contoh, Laporan *Close The Gap* mendorong penggunaan bahasa pribumi.

Pemerintah Australia dapat menggunakan bahasa suku Aborigin untuk berkomunikasi dengan masyarakat mereka. Ini akan membantu menyebarkan dan menerapkan kebijakan kesehatan pemerintah secara lebih efektif. Laporan *Close The Gap* tahun 2020 menyatakan bahwa partisipasi tokoh-tokoh akademisi dan dari masyarakat suku Aborigin sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah untuk mencapai kebijakan yang baik dan efektif dengan mempertimbangkan kearifan lokal tanpa mengabaikan elemen lokal yang penting.

Pada bulan Juli 2020, masyarakat Australia bergabung dengan gerakan *Black Lives Matter*, yang menarik perhatian dunia setelah kematian pria Afrika-Amerika George Floyd. *Black Lives Matter Movement* mulai muncul di beberapa kota di Amerika Serikat tetapi kemudian menyebar ke banyak negara lain, termasuk Australia. Untuk mendukung *Black Lives Matter*, demonstrasi diadakan di Melbourne, Sydney, Adelaide, dan Brisbane.

Black Lives Matter di Australia memiliki kampanye yang sangat berbeda dari yang di Amerika Serikat. Kampanye tersebut berfokus pada diskriminasi rasial yang terjadi di negara ini, terutama yang berkaitan dengan kematian warga Aborigin yang terlibat dalam gerakan tersebut. Sebagai contoh, kematian pria Aborigin David Dungay, yang menderita skizofrenia, menarik perhatian masyarakat Australia.

Kasus kematian pria Aborigin David Dungay yang menderita Skizofrenia, misalnya, telah menarik perhatian masyarakat Australia. Pada tahun 2015, Dungay mengalami tindakan kekerasan dari empat petugas kepolisian di rumah sakit penjara Long Bay. Dengan mengangkat masalah seperti ini, masyarakat Australia berusaha mendapatkan keadilan dan perubahan pada sistem yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap Aborigin dan kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, *Black Lives Matter* telah berkembang menjadi kampanye di Australia untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan serta menekankan bahwa ada perlunya perubahan dalam cara penanganan kematian yang melibatkan petugas keamanan.

Anggota keluarga David Dungay mengajukan tuntutan terhadap empat anggota polisi karena melakukan tindakan kekerasan terhadap David Dungay, yang menyebabkan kematiannya yang tragis. Namun, sampai tahun 2020, keluarga tersebut belum mendapatkan keadilan atas kasus ini. Pada bulan Juni 2020, Komisi Hak Asasi Manusia Australia melaporkan bahwa sejak tahun 1991, sudah ada 432 warga suku Aborigin yang meninggal saat ditahan. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa kelompok suku Aborigin menyumbang 28% dari total populasi tahanan di seluruh penjara di Australia, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di negara tersebut.¹⁴

Selama hampir tiga puluh tahun terakhir, Komisi Hak Asasi Manusia Australia telah aktif terlibat dalam berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kematian orang

¹⁴ 4 Cox, R. W. (1985). *Social Forces, States and World Orders. Postscript 1985. In Neorealism and its critics (pp. 239–249).*

Aborigin di penjara. Salah satu inisiatif utama mereka adalah memberikan pendidikan kepada kaum muda Aborigin mengenai sistem peradilan Australia, dengan tujuan akhir mencegah mereka terlibat dalam masalah hukum. Selain itu, komisi sering memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Australia mengenai sistem peradilan dan mengadvokasi pengurangan hukuman serta sanksi yang lebih adil bagi orang Aborigin.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa komisi tidak memiliki wewenang untuk memaksa pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Pengurangan proporsionalitas penahanan individu Aborigin di Australia diakui secara luas sebagai hasil dari diskriminasi rasial sistemik.¹⁵

Tujuan pendirian gerakan ini adalah untuk memperoleh dukungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam melawan diskriminasi berdasarkan ras, suku, dan budaya yang menyebabkan *Human Insecurity*. Meskipun kita saat ini hidup dalam era globalisasi modern, tindakan rasisme masih mendominasi perilaku manusia terhadap sesama manusia yang sebenarnya memiliki hak dan martabat yang sama sebagai makhluk sosial. Melalui gerakan ini, diharapkan masyarakat berkulit hitam akan mencapai kesetaraan hukum tanpa kecuali dan tujuannya adalah untuk mengatasi sikap diskriminasi terhadap minoritas dalam pandangan hukum.¹⁶

¹⁵ Horkheimer, M. (2012). Traditional and critical theory. *Classical Sociological Theory*, 425– 436

¹⁶ [Peranan Gerakan Black Lives Matter dalam Human Insecurity - Kompasiana.com](#)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui apa saja Pengaruh kebijakan Amerika Serikat terhadap Australia dalam penegakan keadilan hak asasi manusia pada resonansi Gerakan black lives matter tahun 2013-2014 maka dalam pertanyaan penelitian masalah tersebut penulis akan mencoba mencari :

1. Bagaimana kebijakan Amerika Serikat dan Australia dalam upaya penegakan keadilan hak asasi manusia pada resonansi black lives matter?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana kebijakan Amerika Serikat dan Australia dalam menangani isu penegakan keadilan hak asasi manusia pada resonansi Black Lives Matter

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pembelajaran dan bisa menjadi salah satu referensi untuk hal yang berkaitan dengan HAM, Ras dan Etnis dan bagaimana Secara akademis Tulisan ini memiliki tujuan utama sebagai panduan berharga bagi kemajuan Hubungan Internasional, terutama dalam mengatasi Diskriminasi Rasial. Fokus dari karya ini adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang Hubungan Internasional melalui temuan-

temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar selama kegiatan perkuliahan, serta memperkaya wawasan para pembaca mengenai isu-isu rasial yang relevan dalam konteks global.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah yang akan penulis buat ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, tetapi masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan juga saling melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mana merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang kemudian dituangkan ke dalam konteks yang jelas dan juga padat. Maka dari itu, deskripsi karya tulis diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa saja yang menjadi alasan memilih judul, lalu adapun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, serta perbandingannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi dan parameter.

Bab keempat, berisi bahasan penelitian, hasil temuan peneliti yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis melalui sub-bab untuk menjadi pendukung dalam menjawab rumusan masalah.

Bab kelima, berisi analisis hasil penelitian yang akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

Bab enam, sebagai bab akhir yang memuat kesimpulan yang diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian yang ditemukan. Sehingga pembaca dapat memahami isu terkait dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang.

